

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM MENYEBARKAN PENJELASAN TENTANG BANK SYARI'AH

Sabda Purnama Abdullah¹, Adithya Wirathama²

1,2 Universitas Muhammadiyah Makassar. Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sabda Purnama Abdullah

E-mail: abdillahsabdapurnama@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the implementation of sharia economic law in an effort to disseminate explanations about sharia banking to the public. The research results show that the implementation of sharia economic law has an important role in spreading understanding about sharia banking through three main aspects: (1) Education and outreach, including curriculum development, training and media campaigns; (2) Regulations and policies, including strengthening the legal framework and sharia supervision; and (3) Product and service innovation in accordance with sharia principles. The main challenges faced include a lack of public understanding, limited competent human resources, and competition with conventional banks. Proposed strategies to overcome these challenges include increasing collaboration between institutions, developing sharia financial literacy programs, and harmonization of sharia standards.

Keywords: Sharia Economic Law, Sharia Bank, Education, Regulation, Innovation

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam upaya menyebarkan penjelasan tentang bank syari'ah kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syari'ah memiliki peran penting dalam menyebarkan pemahaman tentang bank syari'ah melalui tiga aspek utama: (1) Edukasi dan sosialisasi, meliputi pengembangan kurikulum, pelatihan, dan kampanye media; (2) Regulasi dan kebijakan, termasuk penguatan kerangka hukum dan pengawasan syari'ah; dan (3) Inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan persaingan dengan bank konvensional. Strategi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini mencakup peningkatan kerjasama antar lembaga, pengembangan program literasi keuangan syari'ah, dan harmonisasi standar syari'ah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Bank Syari'ah, Edukasi, Regulasi, Inovasi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu manifestasi penting dari sistem ekonomi syari'ah adalah kehadiran bank syari'ah. Namun, pemahaman masyarakat tentang bank syari'ah masih terbatas. Artikel ini akan membahas bagaimana implementasi hukum ekonomi syari'ah dapat berperan dalam menyebarkan penjelasan tentang bank syari'ah kepada masyarakat luas.

Hukum ekonomi syari'ah adalah seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur sistem perekonomian umat Islam. Prinsip utamanya meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong bagi hasil (profit-sharing) dan kerjasama ekonomi yang adil (Manan, 2012).

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syari'ah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan jual-beli dalam produk-produknya (Ascarya, 2006).

Dalam konteks ini, implementasi hukum ekonomi syari'ah memiliki peran krusial. Hukum ekonomi syari'ah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, tidak hanya menjadi landasan operasional bank syari'ah, tetapi juga berperan penting dalam menyebarkan pemahaman tentang sistem perbankan syari'ah kepada masyarakat luas. Melalui penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem perbankan, diharapkan masyarakat akan semakin memahami esensi dan keunggulan bank syari'ah.

Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi hukum ekonomi syari'ah dapat menjadi instrumen efektif dalam menyebarkan penjelasan tentang bank syari'ah. Pembahasan akan mencakup konsep dasar hukum ekonomi syari'ah, karakteristik bank syari'ah, strategi implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam konteks edukasi publik, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses ini.

Dengan memahami peran penting implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam menyebarkan penjelasan tentang bank syari'ah, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem perbankan syari'ah di Indonesia. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan alternatif yang viable bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

1. Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Penyebaran Informasi

a. Edukasi Publik

- 1) Mengadakan seminar dan workshop tentang prinsip-prinsip ekonomi syari'ah
- 2) Menyusun kurikulum pendidikan ekonomi syari'ah di sekolah dan perguruan tinggi
- 3) Membuat kampanye media massa tentang keunggulan sistem ekonomi syari'ah

b. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Memperkuat kerangka hukum untuk operasional bank syari'ah
- 2) Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung perkembangan bank syari'ah
- 3) Menyusun standar operasional yang jelas dan transparan untuk bank syari'ah

c. Inovasi Produk dan Layanan

- 1) Mengembangkan produk-produk bank syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 2) Meningkatkan aksesibilitas layanan bank syari'ah melalui teknologi digital
- 3) Menciptakan program-program yang memudahkan masyarakat untuk beralih ke bank syari'ah

2. Tantangan dalam Implementasi

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi syari'ah
- b. Persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan
- c. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi syari'ah
- d. Perlunya harmonisasi antara hukum syari'ah dan hukum positif nasional

3. Strategi Mengatasi Tantangan

- a. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan, ulama, dan praktisi perbankan syari'ah
- b. Melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing bank syari'ah
- c. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi syari'ah
- d. Melakukan review dan penyempurnaan regulasi secara berkala

4. Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DSN dan DPS memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan bank syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Mereka juga berperan dalam

memberikan fatwa dan rekomendasi terkait produk dan operasional bank syari'ah (Sutedi, 2009).

5. Prospek Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan bank syari'ah. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang kondusif dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Manan (2012), hukum ekonomi syari'ah adalah seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur sistem perekonomian umat Islam. Zainuddin Ali (2008) menambahkan bahwa hukum ekonomi syari'ah mencakup peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non-komersial berdasarkan hukum Islam.

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur aktivitas dan transaksi ekonomi umat Muslim. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fondasi filosofis hukum ekonomi syariah didasarkan pada konsep tauhid (keesaan Allah), yang menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus sejalan dengan kehendak Allah dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia.

B. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah

Chapra (2000) mengidentifikasi lima prinsip utama ekonomi syari'ah: a) Tauhid (Keesaan Allah); b) 'Adl (Keadilan); c) Nubuwwah (Kenabian); d) Khilafah (Pemerintahan); e) Ma'ad (Hasil).

Ayub (2007) menambahkan prinsip-prinsip operasional seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban zakat dan kerjasama ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah merupakan landasan fundamental yang membentuk kerangka sistem ekonomi Islam. Berikut adalah deskripsi rinci tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

- a. Konsep: Menegaskan keesaan dan kedaulatan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

- b. Implikasi: Semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah dan harus selaras dengan kehendak Allah.
 - c. Penerapan: Menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba dan penipuan.
2. 'Adl (Keadilan)
- 1) Konsep: Menekankan keseimbangan dan keadilan dalam semua transaksi ekonomi.
 - 2) Implikasi: Mencegah eksploitasi dan memastikan distribusi kekayaan yang merata.
 - 3) Penerapan: Implementasi sistem bagi hasil yang adil, penetapan harga yang wajar, dan larangan monopoli.
- a. Nubuwwah (Kenabian)
- 1) Konsep: Mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah (transaksi).
 - 2) Implikasi: Menjadikan etika bisnis Nabi sebagai panduan dalam aktivitas ekonomi.
 - 3) Penerapan: Menerapkan kejujuran, integritas, dan transparansi dalam transaksi ekonomi.
- b. Khilafah (Pemerintahan)
- 1) Konsep: Manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik.
 - 2) Implikasi: Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi.
 - 3) Penerapan: Regulasi ekonomi yang sesuai syariah, pengawasan pasar, dan perlindungan konsumen.
- c. Larangan Riba (Bunga)
- 1) Konsep: Pelarangan keras terhadap praktik riba dalam segala bentuknya.
 - 2) Implikasi: Mendorong sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga.
 - 3) Penerapan: Pengembangan produk keuangan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Prinsip-prinsip ini saling terkait dan membentuk kerangka komprehensif yang mengarahkan semua aspek aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam mengembangkan dan mengoperasikan lembaga keuangan syari'ah, termasuk bank syari'ah, serta dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Konsep Bank Syari'ah

Ascarya (2006) mendefinisikan bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli berdasarkan prinsip syari'ah. Antonio (2001) menekankan bahwa bank syari'ah beroperasi berdasarkan bagi hasil, bukan bunga.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utamanya meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Bank syariah mengedepankan konsep bagi hasil dan kemitraan dalam transaksinya.

Landasan Hukum Operasional bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, ijma' ulama, dan fatwa lembaga-lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN). Di Indonesia, landasan hukum formalnya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Konsep bank syariah terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan yang unik ini, bank syariah menawarkan alternatif sistem perbankan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek etika dan keadilan sosial-ekonomi.

PENUTUP

Implementasi hukum ekonomi syari'ah memiliki peran krusial dalam menyebarkan pemahaman tentang bank syari'ah. Melalui edukasi yang komprehensif, regulasi yang tepat, dan inovasi produk, diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan tertarik untuk menggunakan jasa bank syari'ah. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, bank syari'ah dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Irwan, & Hana Tuo. (2024). Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 333–339. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1325>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Herlina, Akad Muzara'ah, Petani, Bawang Merah, Muhammad Ridwan, & Ulil Amri. (2024). Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 2(4), 642–647. Retrieved from <https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1893>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.